



Sembunyi di Apartemen Mewah

Haris: Buronan KPK Dijaga Pasukan Khusus

JAKARTA, TRIBUN - Dua buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semasa kepemimpinan Firli Bahuri dan kawan-kawan, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan eks caleg PDI Perjuangan Harun Masiku, menjadi sorotan lantaran tak kunjung tertangkap.

Lambatnya penangkapan kedua sosok tersebut membuat pegiat antikorupsi mengkritisi internal KPK dengan menggelar sayembara hingga melakukan penelusuran sendiri.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menyebut, sebenarnya KPK sudah mengetahui keberadaan buronannya, Nurhadi dan menantunya, Riezky Herbiono, yakni di sebuah apartemen mewah di Jakarta. Namun, KPK yang kini dipimpin Firli Bahuri dkk itu tidak berani menangkap buronannya itu.

Hal itu disampaikan Haris Azhar saat mendampingi saksi kunci dalam kasus dugaan suap Nurhadi, Paulus Welly


Inilah bukti bahwa KPK tambah hari tambah keropos

Haris Azhar

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation

Afandy, untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/2).

Ia menceritakan, Nurhadi dan menantunya mendapat perlindungan ketat yang disebutnya sebagai "premium protection" di apartemen mewah itu. Selain akses khusus untuk memasuki apartemen itu, keberadaan Nurhadi dan menantunya juga dijaga ketat oleh sekelompok pasukan khusus.

Haris mengatakan, perlindungan ketat itulah yang membuat KPK tidak kunjung berani menangkap Nurhadi dan menantu yang merupakan tersangka kasus suap

dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA itu.

"Semua orang, dalam artian yang terkait dalam pengungkapan kasus ini, itu tahu bahwa Nurhadi dan menantunya ada di mana. Cuma juga mereka dapat proteksi perlindungan yang golden premium protection," bebernya.

"Artinya, apartemen itu enggak gampang diakses oleh publik. Lalu ada juga tambahannya dilindungi oleh namanya pasukan yang sangat luar biasa itu," sambungnya.

Ia pun menilai status Daftar Pencarian Orang (DPO) yang disematkan KPK kepada Nurhadi serta menantunya, Rezky Herbiyono serta Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto, hanya formalitas belaka. Sebab, para punggawa KPK saat ini tidak berani menangkap orang-orang tersebut.

"DPO formalitas karena KPK enggak berani tangkep Nurhadi dan menantunya. Status itu kan jadi lucu. Inilah bukti bahwa KPK tambah hari tambah keropos," ujar Aktivist yang juga menjadi tim hukum penyidik KPK Novel Baswedan itu.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri meminta Haris Azhar tidak sekadar bicara perihal keberadaan Nurhadi cs di apartemen mewah. Ia meminta Haris menyampaikan informasi tuntas tentang keberadaan Nurhadi cs itu ke internal KPK.

Menurut Ali, pihaknya belum bisa mengonfirmasi bahwa Nurhadi cs yang dijaga ketat oleh pasukan khusus di apartemen tersebut. Ia menolak jika KPK status DPO atau buron yang disematkan KPK kepada Nuhadi dkk dan tersangka lainnya dinilai sebagai formalitas. (tribun network/ilh/gle/coz)